

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah, 2012, *Akuntansi Biaya*, Jakarta : Salemba Empat.
- Azkha, Nirwadi, 2006, *Analisis Timbulan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di Kota Padang*, Padang: Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Basriyanta. (2007). *Memanen Sampah*. Yogyakarta : Kanisius.
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto, 2001, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007, Jurnal Ilmiah “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*”, Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*, UI-Pres.Jakarta
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, 2016, *Revisi Rencana Strategis 2014-2019*, Padang.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Republik Indonesia, *Database APBD*. <http://djkd.kemendagri.go.id>.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum dan Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Jakarta, UII Press.
- Herjanto, Eddy, 2008, *Manajemen Operasi Edisi Ketiga*, Jakarta : Grasindo.
- Hadi, Sri dkk, 2009, *Penetapan Tarif Sewa dan Retribusi Petak Pasar Di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan*, Semarang: FTSP-ITS.
- Halim, Abdul, 2002 *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Don R dan Maryane M Mowen, 1997 *Akuntansi Manajemen (Terjemahan)*, Edisi 4, Jakarta: Erlangga.
- Harian Padang Ekspres, *Sampah 500 ton per hari*, tanggal 23 Agustus 2013.
- Hikmat, Harri, 2000, *Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development)*, Jakarta: Pasca Sarjana UI.
- Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke-8. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Kawedar, Warsito, dkk, 2008, *Akuntansi Sektor Publik (Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah/ Buku 1.)*, Semarang : Salemba Empat
- Kodoatie, Robert J, dkk, 2005, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Yogyakarta: Andi.
- Kasmir, 2011, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khusaini, Muhammad 2006, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE UNIBRAW. Malang
- Menkesra, *Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Sampah Kota*, <http://www.menkokesra.go.id>.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, 1993, *Akuntansi Biaya*, Edisi 5 Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Mulyadi, 2015, *Akuntansi Biaya*, Edisi 5, Yogyakarta STIE YKPN.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo.
- Nurhidayat, Setyo Purwendro, 2010, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Pemerintah Kota Padang, Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang.
- Pemerintah Kota Padang, Peraturan Walikota Padang No. 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.
- Pemerintah Kota Padang, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Pemerintah Kota Padang, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Sumber Masa Depan*, <http://sumbarprov.go.id>.
- Rayburn, Letricia Gayle, *Akuntansi Biaya Dengan Menggunakan Pendekatan Manajemen Biaya* (Terjemahan), Edisi 6, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 245 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 22. Tahun 1999 tentang Asas Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 25. Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Republik Indonesia, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Riwayadi, 2008, *Management Accounting*, Padang: Universitas Andalas.
- Rozza, Deffa, 2009, *Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum Di Beberapa Kota Propinsi Sumatera Barat*, Padang: Universitas Andalas.
- Ruslinda, Yenni, dan Indah Pasimura, 2012, *Satuan Timbulan dan Komposisi Sampah Institusi Kota Padang*, Padang: Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas.
- Syamsi, Ibnu, 1988 *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.